



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDY SUBIYANTADI**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **27374**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.144.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/133 m2 di PATI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 399 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 199.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/56 m2 di PEKALONGAN, WARISAN Rp. 244.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **262.100.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.400.000
4. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.700.000
6. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **26.826.500**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	153.735.396
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.586.661.896
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.586.661.896

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.